

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menggambarkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan salah satu sumber informasi penting bagi investor disamping informasi yang lain, seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar, perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.

Pengertian laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No. 1 (revisi 2009) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pemakailaporan agar dapat membantu aktivitas ekonomi dari suatu perusahaan yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menunjukkan kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008:28-46), pembuatan laporan keuangan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ada, yang dikategorikan berdasarkan: (a) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan; (b) asumsi dasar akuntansi, yaitu: asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan hidup, asumsi unit moneter, asumsi periodisitas; (c) konsep dasar akuntansi, yaitu: prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip *matching*, dan prinsip pengakuan penuh; (d) keterbatasan laporan keuangan, yaitu: materialitas dan konservatisme.

Dari prinsip-prinsip tersebut, yang seringkali digunakan oleh perusahaan adalah prinsip konservatisme akuntansi yang memiliki tujuan untuk menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit. Konservatisme adalah reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan (Dewi, 2003; dalam Juanda, 2007a). Penggunaan prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, sehingga pengukuran dan pengakuan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba

dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Prinsip konservatisme akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Ada dua pendapat yang saling berlawanan dalam penerapan konservatisme sehingga menghasilkan pendapat pro dan kontra (Fala, 2007). Pendapat yang mendukung mengatakan bahwa prinsip konservatisme akan menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Pendapat yang menentang mengatakan bahwa penggunaan prinsip konservatisme telah menghasilkan laporan keuangan yang *understatement* atau bias sehingga dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan tidak dapat dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan.

Pendapat mengenai kontroversi konservatisme akuntansi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Kam (1995) dan Qiang (2003) dalam Juanda (2007b) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan konservatisme akuntansi ditolak antara lain: (1) *Ketidakkonsistenan*. Ketika aset dilaporkan terlalu rendah karena digunakan atau dijual, hal ini akan mengakibatkan laba

dilaporkan terlalu tinggi. Dalam kasus lain, laba yang yang dilaporkan terlalu rendah pada periode sekarang akan dilaporkan terlalu tinggi pada periode berikutnya; (2) *Ketidakteraturan*. Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan berkaitan dengan perihal kebijakan perusahaan. Misalnya, ketika mengantisipasi kerugian, mungkin dicatat dan mungkin tidak karena suatu ekspektasi selalu dapat direvisi; (3) *Penyembunyian*. Investor mengalami kesulitan menentukan dan menemukan jumlah aset yang dilaporkan terlalu rendah, sehingga dalam kasus ini investor dalam posisi tidak diuntungkan dan memberi peluang keuntungan bagi pihak dalam; (4) *Kontradiktif*. Konservatisme akuntansi bertentangan dengan prinsip akuntansi lainnya antara lain prinsip kos, prinsip penandingan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan; (5) konservatisme akuntansi bertentangan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain, relevan, reliabilitas, dan komprabilitas.

Konservatisme merupakan konvensi laporan keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut sebagai prinsip akuntansi yang dominan. Konvensi seperti konservatisme menjadi pertimbangan dalam akuntansi laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilengkapi oleh ketidakpastian. Masalah konservatisme merupakan masalah penting bagi investor di dalam melakukan penilaian akan nilai ekuitas perusahaan.

Wardhani (2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak

internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari implementasi *good corporate governance*. Implementasi dari *corporate governance* dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu dari kebijakan ini terkait dengan prinsip konservatisme yang digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran konservatisme dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai ekuitas perusahaan.

PEMBAHASAN

1. Konservatisme Akuntansi dan Pengukurannya

Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 2002; dalam Suaryana, 2008). Wolk *et al.* (2001) dalam Safiq (2010) memberikan definisi konservatisme akuntansi sebagai usaha untuk memilih metode akuntansi berterima umum yang (a) memperlambat pengakuan *revenues*, (b) mempercepat pengakuan *expenses*, (c) merendahkan penilaian aktiva, dan (d) meninggikan penilaian utang.

Definisi tersebut mengakibatkan nilai aktiva bersih yang *understated* secara persisten dengan kata lain konservatisme tidak mengantisipasi laba tetapi mengantisipasi semua kerugian.

Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberikan informasi yang tepat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Watts (2003) dalam Haniati dan Fitriany (2010) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, sehingga laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Konservatisme akuntansi juga merupakan asimetri dalam permintaan verifikasi terhadap laba dan rugi. Interpretasi tersebut berarti bahwa semakin besar perbedaan tingkat verifikasi yang diminta terhadap laba dibandingkan terhadap rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, konservatisme dapat membatasi kecenderungan dari pihak manajemen untuk membesarkan laba ketika menghadapi klaim atas aset perusahaan. Konservatisme merupakan praktik akuntansi dengan mengurangi laba (dan menurunkan nilai aktiva bersih) ketika

menghadapi *bad news*, akan tetapi meningkatkan laba (dan menaikkan nilai aktiva bersih) ketika menghadapi *good news* (Basu, 1997; dalam Almilia, 2007).

Dari sudut pandang manajemen dan penyusunan laporan keuangan, konservatisme didefinisikan sebagai metode akuntansi berterima umum yang melaporkan aset dengan nilai terendah, kewajiban dengan nilai tertinggi, menunda pengakuan pendapatan, serta mempercepat pengakuan biaya. Definisi ini menunjukkan bahwa akuntansi konservatif tidak saja berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, tapi juga berkaitan dengan estimasi yang mengakibatkan nilai buku aset menjadi relatif rendah (Wolk, 2001; dalam Lo, 2006).

Menurut Richardson dan Tinaikar (2003) dalam Kiriyanto dan Suprianto (2006) menunjukkan bahwa ada dua jenis laba konservatisme, yaitu :

- (1) *Ex-ante conservatism* atau *news-independent conservatism* (Chandra et.al, 2004; dalam Kiriyanto dan Suprianto 2006), berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi laba secara independen dari kejadian-kejadian ekonomi saat ini, bahkan apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut berkaitan secara positif dengan harapan aliran kas dimasa yang akan datang. Contoh dari *ex-ante conservatism*, antara lain: pengakuan dengan segera terhadap biaya iklan (*advertensi*), pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan.

- (2) *Ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism* (Chandra et.al, 2004; dalam Kiriyanto dan Suprianto 2006), menggambarkan lebih tepat waktu untuk pengakuan laba terhadap *bad news* dari pada *good news*. Secara umum, prinsip akuntansi ini menghendaki penghapusan dengan segera untuk mengakui *bad news* terhadap persediaan, goodwill, ketidakpastian kerugian dan sebaliknya. Sebagai contoh: aturan tentang harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar persediaan, penghapusan goodwill yang sudah tidak mempunyai manfaat dimasa yang akan datang. Penggunaan dari *ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism* ini menghasilkan *slope* koefisien regresi laba terhadap return yang lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan dengan negatif return (*bad news*) dari pada positif return (*good news*).

Praktik konservatisme bisa terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan pada situasi untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan metode yang diperbolehkan pada situasi yang sama. Jika diamati lebih jauh, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) cenderung pada akuntansi konservatif dalam beberapa PSAK (IAI, 2009) diantaranya yaitu:

- a. PSAK No. 14 (2009), paragraf 8 menyatakan persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi netto, mana yang lebih rendah.
- b. PSAK No. 19 (2009), paragraf 36 menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang

timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu proyek internal). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

- c. PSAK No. 48 (2009), paragraf 41 menyatakan jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.
- d. PSAK No. 57 mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontijensi, dan aset kontijensi. Dengan adanya penerapan prinsip konservatisme tersebut, dapat dikatakan jika secara tidak langsung konservatisme akan berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui konservatisme laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Watts (2003) membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *earning/stock return relation measures*, *earning/accrual measures*, dan *net asset measures*. Berikut beberapa pengukuran konservatisme dan penjelasannya:

- a. *Earnings/stock return relation measures* (berdasarkan hubungan *earning* dan *return*) (Watts, 2003; dalam Widya, 2005). Konservatisme mempengaruhi asimetri dalam ketepatan pelaporan kejadian ekonomi dalam *earning*. *Bad news* akan

direfleksikan dalam *earning* lebih cepat daripada *good news*. *Earning* diharapkan lebih berkorelasi dengan pergerakan harga saham dalam periode *bad news* daripada *good news*. Jadi ukuran konservatisme adalah kelebihan hubungan antara pergerakan harga saham dengan sinyal *earning* dalam periode *bad news* dan *good news*. Pengukuran semacam ini disebut dengan “*earnings/stock returns relation measures*”, yang dijabarkan menjadi:

$$EPS_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{i,t} + \beta_0 R_{i,t} + \beta_1 DR_{i,t} * R_{i,t} + e_{it}$$

Dimana:

$EPS_{i,t}$ = laba per lembar saham i tahun t

$R_{i,t}$ = *return* saham i tahun t

$DR_{i,t}$ = Variabel *dummy* dengan nilai 1 jika $R_{i,t} < 0$ (proksi kabar buruk) dan 0 jika $R_{i,t} > 0$ (proksi kabar baik)

= intersep

= koefisien variabel dummy jenis periode

= koefisien (slop) regresi

= koefisien variabel interaksi return dan jenis periode

e_{it} = *error terms*

- b. *Earnings/accrual measures* (menggunakan akrual), yaitu selisih antara laba bersih (*net income*) dan arus kas (*cash flow*). *Net income* yang digunakan adalah *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah *cash flow* operasional. Jika akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif (Givoly dan Hayn, 2000; dalam

Sayidah, 2005). Hal ini disebabkan karena laba lebih rendah dari *cash flow* yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Pengukuran ini disebut dengan “*earning/accrual measures*”, yang dapat dijelaskan dalam bentuk sebagai berikut:

$$C_{it} = NI_{it} - CF_{it}$$

Dimana:

C_{it} = tingkat konservatisme

NI_{it} = laba bersih sebelum *extraordinary item* dikurangi depresiasi dan amortisasi

CF_{it} = arus kas dari kegiatan operasional

- c. *Net asset measures (berorientasi pada neraca)*, ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) dalam Haniati dan Fitriany (2010) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

2. *Good Corporate Governance*

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan

Meckling (1976) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Corporate governance yang merupakan konsep berdasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Konsep ini juga dapat diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007; dalam Rahmawati, 2010). Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas

investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Hastuti 2005). Dengan kata lain tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

OECD (*organisation for economic co-operation and development*) (2004) dan FCGI (*forum for corporate governance in Indonesia*) (2001) dalam Ilona dan Zaitul (2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003), menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*.

Menurut Cadbury Report (1992) dalam Arifin (2005) terdapat prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah: transparansi (*transparency*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Penjelasan dari keempat prinsip tersebut antara lain:

- a. *Transparency*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*performance*” yang berhubungan dengan

kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan.

- b. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Praktik audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektikan komite audit.
- c. *Fairness*, prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak dengan kata lain, prinsip ini memaksimalkan upaya perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali.
- d. *Responsibility*, diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

3. Nilai Buku Ekuitas Perusahaan

Penggunaan nilai buku ekuitas dalam model penilaian juga dimotivasi oleh adanya argumen bahwa nilai buku ekuitas merefleksikan nilai adaptasi perusahaan. Burgstahler dan Dichev (1997) dalam Sari (2004) mengembangkan dan menguji suatu model penilaian yang mengenalkan peran saling melengkapi antara laba dan nilai buku. Dengan menggunakan nilai buku sebagai proksi nilai adaptasi perusahaan, mereka menunjukkan bahwa nilai buku lebih penting dalam menentukan nilai ekuitas jika rasio antara laba dan nilai buku rendah karena perusahaan lebih suka memilih cara yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Inkremental nilai buku ekuitas lebih besar pada saat perusahaan menghadapi kebangkrutan atau sedang mengalami kesulitan keuangan.

Burgstahler dan Dichev (1997) dalam Sari (2004) menyatakan bahwa nilai buku yang diperoleh dari neraca memberikan informasi tentang nilai bersih sumber daya perusahaan. Sedangkan laba memberikan suatu ukuran nilai yang merefleksikan hasil dari penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan kondisi

seperti itu dikatakan lebih lanjut bahwa laba relatif lebih penting sebagai penentu nilai ekuitas jika aktivitas perusahaan sekarang menguntungkan. Sebaliknya, jika hasil aktivitas perusahaan tidak menguntungkan maka nilai buku akan menjadi penentu nilai ekuitas yang baik.

Ekuitas membantu dalam menghitung nilai buku (*book value*) suatu perusahaan. Dengan membagi ekuitas dengan jumlah saham beredar, diperoleh nilai buku per saham. Seperti halnya angka rasio lainnya, angka ini berguna jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, untuk menentukan mahal/murahnya suatu perusahaan. Nilai buku saham biasa dihitung dengan cara membagi total seluruh ekuitas (modal sendiri) yang ada di neraca, dengan jumlah lembar saham yang beredar (*outstanding shares*).

Kieso, et al. (2002:312) menyatakan bahwa ekuitas pemilik dalam perusahaan didefinisikan sebagai ekuitas pemegang saham, *shareholders equity*, atau modal perseroan. Tiga kategori berikut ini biasanya muncul sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham:

1. Modal Saham. Nilai pari ditetapkan atas saham yang diterbitkan.
2. Tambahan modal disetor. Kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pari atau ditetapkan.
3. Laba ditahan. Laba korporasi yang tidak didistribusikan.

Dua kategori yang pertama, yaitu modal saham dan tambahan modal disetor, merupakan modal (disetor) kontribusi; sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Modal kontribusi (modal disetor) adalah total jumlah yang disetorkan ke

modal saham jumlah tersebut diberikan oleh pemegang saham kepada perseroan untuk digunakan dalam bisnisnya. Modal kontribusi meliputi pos-pos seperti nilai pari dari semua saham yang beredar dan agio dikurangi disagio atas penerbitan saham itu. Modal yang dihasilkan adalah modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan, modal ini terdiri dari semua laba yang tidak dibagi yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan.

Ekuitas pemegang saham adalah perbedaan antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan bisnis merupakan suatu kepentingan residu. Ekuitas pemilik atau pemegang saham merupakan kontribusi kumulatif bersih oleh pemegang saham ditambah laba yang telah ditahan. Sebagai kepentingan residu, ekuitas pemegang saham tidak memiliki eksistensi di luar aktiva dan kewajiban perusahaan.

Ekuitas adalah nilai kepemilikan para pemegang saham perusahaan, di mana ekuitas merupakan jumlah yang menjadi hak milik para pemegang saham jika perusahaan tersebut melunasi seluruh hutangnya. Kieso, et al. (2002:323) merumuskan ekuitas dengan suatu formula sederhana:

$$\text{Ekuitas} = \text{Modal saham} + \text{Laba ditahan} - \text{Saham treasuri}$$

Dimana:

Modal saham = Modal yang dimiliki oleh pemegang saham untuk diberikan kepada perseroan dan digunakan dalam bisnisnya.

Laba ditahan = Modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan, modal ini terdiri dari semua laba yang tidak dibagi.

Saham treasuri = Saham milik perusahaan yang telah dibeli kembali setelah diterbitkan dan dibayar penuh.

Niali buku menunjukkan nilai bersih kekayaan perusahaan per saham. Dengan demikian nilai buku perusahaan didapat dengan mengurangkan total *asset* perusahaan terhadap hutang dan saham preferen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Salah satu alat ukur yang sangat penting di dalam melakukan analisa laporan keuangan ialah nilai buku per lembar saham, hal ini dikarenakan nilai buku saham merupakan jumlah kekayaan (aktiva) bersih yang tercermin dalam satu lembar saham. Nilai buku ekuitas merupakan return saham biasa perusahaan per lembar di mana nilai buku ini diperoleh dengan mengurangkan total *asset* perusahaan terhadap hutang dan saham preferen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi return saham maka akan semakin besar kepercayaan investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.

4. Peran Konservatisme dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan

Konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi di dalam penilaian akuntansi, prinsip konservatisme sering menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan

perusahaan karena prinsip ini menganut prinsip kehati-hatian. Di satu sisi prinsip konservatisme beranggapan bahwa jika perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dimasa mendatang maka dapat mengakibatkan pengukuran yang dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan laporan keuangan yang dapat merugikan perusahaan. Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian (Watts, 2002; dalam Lo, 2005). Konservatisme dalam perusahaan dapat diterapkan dalam tingkatan yang berbeda-beda di mana dalam laporan keuangan perusahaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain komitmen manajer dan pihak internal perusahaan yang dapat memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Wardhani, 2008).

Banyak kritik mengenai kegunaan konsep konservatisme berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metode yang konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Namun, akhir-akhir ini banyak peneliti yang melihat konservatisme dari sisi manfaatnya, khususnya eksistensi konservatisme pada level perusahaan. Menurut Wolk (1997) dalam Juanda (2007a) definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah:

“Konservatisme sebagai preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Atau dengan kata

lain, konservatisme menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.”

Adanya pelaporan keuangan yang tidak pasti atau bias dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan prinsip konservatisme sehingga dapat menimbulkan masalah penting bagi investor di dalam melakukan penilaian nilai ekuitas perusahaan. Monahan (1999) dalam Juanda (2007b) menyatakan bahwa semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antar waktu). Kondisi ini mendukung simpulan bahwa laporan keuangan itu sama sekali tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya.

Menurut SAK No. 21 (IAI, 2009), ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan, harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Pada umumnya, pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal disetor, saldo laba, selisih penilaian aktiva tetap, dan modal sumbangan.

Dalam prinsip konservatisme, ekuitas mempunyai pengaruh yang penting di mana dalam penyusunan laporan keuangan penilaian perusahaan sering menggunakan proksi *market to book ratio* yang digunakan untuk penilaian ekuitas sehingga dapat memberikan informasi mengenai nilai perusahaan melalui laporan keuangannya. Ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui konservatisme

laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Proksi pengukuran dengan menggunakan rasio market *to book value equity* mencerminkan nilai pasar aktiva relatif terhadap nilai buku aktiva perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Beaver dan Ryan, 2000; dalam Ratna Dewi, 2003). Monahan (1999) dalam Juanda (2007b) menyatakan bahwa semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antar waktu).

Konservatisme yang berpengaruh pada nilai ekuitas perusahaan juga dapat mempengaruhi penerapan *good corporate governance* dalam laporan keuangan karena dapat memainkan sebuah aturan yang signifikan dalam pengimplementasian akuntansi yang konservatif. *Corporate governance* mencakup semua ketentuan dan mekanisme yang menjamin bahwa aset di dalam perusahaan dikelola secara efisien serta dapat mengurangi pengambilalihan sumber daya yang tidak tepat oleh manajer atau bagian lain dari perusahaan karena dalam menentukan tingkatan konservatisme diperlukan informasi yang akurat di dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap seluruh pihak dalam perusahaan dan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam memonitori dan mengevaluasi nilai ekuitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini memperkuat

pernyataan Fala (2007) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa konservatisme berpengaruh positif secara signifikan terhadap penilaian ekuitas perusahaan, hal ini berarti bahwa investor/pasar menerima sinyal tentang penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan dan menilai lebih dengan memberikan premium tinggi bagi harga saham perusahaan tersebut. Hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa variabel jumlah dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* merupakan variabel pemoderasi yang dapat menginteraksi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan meskipun pengaruhnya negatif. Pernyataan ini dapat memperjelas peran konservatisme terhadap penilaian ekuitas di mana dalam penerapannya konservatisme memerlukan pihak internal perusahaan yang dapat memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya sehingga hal ini dapat mendukung penerapan *good corporate governance* yang dapat berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan.

Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Hapsoro (2006), secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pertama adalah mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat. Karena *corporate governance* merupakan

suatu mekanisme yang dapat mengendalikan (mengatur) perilaku *stakeholders* dengan demikian *corporate governance* dapat mempengaruhi pilihan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang terkait dengan prinsip konservatisme. Sehingga pilihan terhadap suatu metode akuntansi yang terkait dengan prinsip konservatisme dipengaruhi juga oleh struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi dalam penilaian nilai ekuitasnya.

SIMPULAN

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran konservatisme dan implementasi *good corporate governance* terhadap nilai ekuitas perusahaan. Konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan atau sikap kehati-hatian yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, sehingga jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung rendah serta angka-angka utang dan biaya yang cenderung tinggi. Masalah konservatisme merupakan masalah penting bagi investor dalam melakukan penilaian ekuitas perusahaan. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dengan memberikan informasi yang transparan,

akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya, karakteristik tersebut merupakan implementasi dari *good corporate governance*.

Semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai buku yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antar waktu). Hal ini dikarenakan laporan keuangan tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya. Dalam prinsip konservatisme, ekuitas mempunyai pengaruh yang penting di mana dalam penyusunan laporan keuangan penilaian perusahaan sering menggunakan proksi *market to book ratio* yang digunakan untuk penilaian ekuitas sehingga dapat memberikan informasi mengenai nilai perusahaan melalui laporan keuangannya. Konservatisme yang berpengaruh pada nilai ekuitas perusahaan juga dapat mempengaruhi penerapan *good corporate governance* dalam laporan keuangan karena dapat memainkan sebuah aturan yang signifikan dalam pengimplementasian akuntansi yang konservatif. *Corporate governance* mencakup semua ketentuan dan mekanisme yang menjamin bahwa aset di dalam perusahaan dikelola secara efisien serta dapat mengurangi pengambilalihan sumber daya yang tidak tepat oleh manajer atau bagian lain dari perusahaan karena dalam menentukan tingkatan konservatisme diperlukan informasi yang akurat di dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap seluruh pihak dalam perusahaan dan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam memonitori dan mengevaluasi nilai ekuitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L.S. 2007. Pengujian Size Hypothesis Dan debt/Equity Hypothesis Yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Teknik Analisis Multinomial Logit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. <http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30>.
- Arifin. 2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia: Tjauan Prospektif Teori Keagenan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dewi, R.A.A.A. 2004. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap Earnings Respons Coefficient. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.7, No.2, Mei: 207-223.
- Fala, D.A.S. 2007. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Haniati, S dan Fitriany. 2010. Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Purwokerto.
- Hapsoro, D. 2006. Mekanisme *Corporate Governance* Transparansi dan Konsekuensi Ekonomik (Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia). Disertasi S3 Program Doktor UGM. Yogyakarta.

- Hastuti, T.D. 2005. Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilona, D dan Zaitul. 2011. Hubungan Informasi Akuntansi Keuangan dan Mekanisme *Corporate Governance*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. <http://www.fab.utm.my/download/ConferenceSemiar/ICCI2006S6PP04.pdf/2011/03/15>.
- Juanda, A. 2007a. Pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- _____. 2007b. Perilaku Konservatif Pelaporan Keuangan dan Risiko Litigasi pada Perusahaan Go Publik di Indonesia. *Naskah Publikasi Penelitian Dasar Keilmuan*. Malang.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt dan T.D. Warfield. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi 12. New Jersey: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- _____. 2002. *Intermediate Accounting*. Jilid 2, Edisi Kesepuluh. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

- Kiriyanto dan E. Suprianto. 2006. Pengaruh Moderasi Size terhadap Hubungan Laba Konservatisme dengan Neraca Konservatisme. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Lo, E.W. 2006. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.9, No.1, Januari: 87-114.
- Rahmawati, F. 2010. Pengaruh Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Skripsi Tidak dipublikasikan*. Semarang: Program Sarjana Strata-1 Universitas Diponegoro Semarang.
- Safiq, M. 2010. Kepemilikan Manajerial, Konservatisme Akuntansi, dan Cost of Debt Abstract. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Purwokerto.
- Sari, S.M. 2004. Analisa terhadap Relevansi Nilai (*value-relevance*) Laba, Arus Kas dan Nilai Buku Ekuitas: Analisa diseputar perioda krisis keuangan 1995-1998. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar Bali.
- Sayidah, N. 2005. Sifat-Sifat Time Series dari Angka Akuntansi dan Konservatisme Industri Manufaktur. *JAAI* Vol.9, No.2, Desember: 143-157.
- Suaryana, A. 2008. Pengaruh Konservatisme Laba terhadap Koefisien Respon Laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol.3, No.1, Januari.

- Ujiyantho, A dan B.A Pramuka. 2007. Mekanisme *Corporate Governnace*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Wardhani, R. 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Widya. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan terhadap Akuntansi Konservatif. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.8, No.2, Mei.